BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada hakekatnya manusia diciptakan berpasang-pasangan, dan Islam telah menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan.³ Perkawinan tidak lepas dalam kehidupan umat muslim dan kelanjutan dari sebuah perkawinan adalah timbulnya harta waris. Harta waris merupakan harta yang muncul pada saat pewaris meninggal dunia. Orang yang mewariskan benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa pewaris telah meninggal. Ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan.⁴

Kewarisan suatu peristiwa bagi seorang manusia ketika seseorang tersebut meninggal dunia, maka terjadilah perpindahan warisan dari seorang manusia kepada manusia lainnya. Dengan kata lain pewarisan adalah aturan mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya. Kewarisan juga berarti menentukan siapa-siapa yang akan menjadi ahli waris, menentukan porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta warisan bagi orang yang meninggal. Dasar hukum dalam waris islam adalah Al-Quran dan Hadist, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, pendapat ahli hukum islam.

Disisi Lain Mediasi pengikutsertaaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Orang yang melakukan mediasi dinamakan mediator. Atau kata lain mediasi dapat dikatakan sebagai suatu masalah yang dapat dibantu

³ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 71.

⁴ Perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

penyelesaian masalahnya oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan.⁵

Maka dapat diartikan bahwa mediasi serangkaian proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa. Menurut Priatna Abdurrasyid mediasi adalah proses damai dimana pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator untuk mencapai hasil yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan tetap diterima.⁶Sedangkan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.⁷

Dengan adanya perjanjian damai mediasi tertulis ini berarti meniadakan hak para pihak buat mengajukan penyelesaian permasalahan sengketa pada Pengadilan Negeri, menggunakan sendirinya Pengadilan Negeri tidak berwenang buat mengadili Sengketa para pihak yang sudah terikat pada perjanjian arbitrase⁸. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata pada luar yang didasarkan dalam perjanjian arbitrase, yang dibentuk secara tertulis para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan suatu cara buat merampungkan sengketa atau beda pendapat perdata sang para pihak melalui cara

⁵*Ibid.*, hlm 34

⁶ Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep WinWin Solution*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), hlm.133.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 (Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa)

⁸ Andre setiawan, *Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasioanal*, (Lex Et Societatis, Vol. Iii/No. 1/Jan-Mar/2020), Hlm 162.

lain penyelesaian sengketa yang didasarkan dalam itikad baik menggunakan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi pada Pengadilan Negeri. Penyelesaian Sengketa melalui arbitrase merupakan suatu cara buat merampungkan sengketa atau beda pendapat perdata sang para pihak melalui cara lain penyelesaian Sengketa yang didasarkan dalam itikad baik menggunakan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi pada Pengadilan Negeri.⁹

Desa merupakan bentuk pemerintahan formal terkecil pada struktur pemerintahan pada Indonesia. Sampai tahun 2016 terdapat lebih kurang 73.000 (tujuh puluh 3 ribu) Desa dan lebih kurang 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Desa-Desa tadi bisa dibedakan antara Desa biasa dan Desa adat. Lantaran itu, terdapat 2 konsep warga menurut pembagian terstruktur mengenai Desa itu, yaitu warga Desa, dan warga adat. Pelanggaran terhadap keberadaan dan bukti diri kultural warga aturan adat, terjadi selesainya diundangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 mengenai Pemerintahan Desa, sewaktu semua struktur pemerintahan Desa pada Indonesia disamakan dari contoh pemerintahan Desa pada pulau Jawa yang semata-mata bersifat teritorial dan mengakui warga aturan adat. Akibatnya Desa-Desa teritorial genealogis, komunitas nomadik dan atau warga aturan adat, yang masih ada pada luar pulau Jawa pada kurun sejarah yang panjang, sudah tereliminasi.¹⁰

Pada dasarnya setiap sengketa masyarakat Desa tidak selamanya wajib berakhir pada pengadilan. Dalam hal-hal eksklusif setiap sengketa yang timbul yang melibatkan masyarakat Desa idealnya bisa diselesaikan dengan segera mungkin pada taraf Desa saja. Apalagi sengketa masih adalah sengketa yang bersifat kekeluargaan, maka solusinya pun

⁹ Pasal 77 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999

¹⁰ Donny Michael, *Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No. 1, Juli 2016, Hlm 22

seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan melalui perantaranya seseorang ketua Desa. Tugas buat merampungkan setiap konflik yang muncul pada Desa tadi kiranya bukan adalah beban berat yang baru bagi seseorang Ketua Desa, melainkan adalah suatu kewajiban adalah kewenangan yang inheren dalam dirinya menjadi Ketua Desa sekaligus ketua pemerintahan Desa. Ketentuan mengenai hak-hak yang diberikan tentu saja dari Kepala Desa. Hal ini diperlukan untuk menggunakannya secara efektif, cocok untuk mewujudkan pemerintahan Desa yang bisa terjaminnya ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Dalam perkara yang observasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa terdapat sepasang suami istri yaitu bapak khudori yang menikah dengan Ibu Arsiah (Istri Pertama) dan memiliki anak 2 laki-laki dan perempuan yang bernama, laki-laki ranendara dan yang perempuan bernama sinthiya. Karena ada percekcoakan akhirnya bapak khudori berpisah dengan ibu arsiyah kemudian menikah kembali dengan ariyah dan memiliki anak bawaan dua, permasalahan yang ada terdapat harta waris berupa tanah 2200 m² dan rumah 30 ru, setelah meninggalnya bapak khudori, istri pertama ibu arsiyah meminta bagiannya, berupa tanah, karena mengingat saat ini rumah sedang di tempati oleh istri kedua.¹¹ berdasarkan Penjelasan ini mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut yang berkaitan dengan “Mediasi Sengketa Waris Perspektif *Ash Shulhu* (Studi Kasus Di Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)”

¹¹ Hasil Observasi di Desa Banjaranyar pada 12 Maret 2024

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas. Dari beberapa uraian diatas maka fokus masalah mengenai penyelesaian sengketa waris dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Mediasi Sengketa Waris di Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Mediasi Sengketa Waris di Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Perspektif *Ash Shulhu*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan Mediasi Sengketa Waris di Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri
2. Untuk menganalisis Mediasi Sengketa Waris di Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Perspektif *Ash Shulhu*

D. Kegunaan Hasil Penelitian

A. Secara Teoritis

Dengan dibuatnya penelitian ini tentunya dapat menambah banyak wawasan keilmuan yang lebih luas dan menjadi pemahaman yaitu tentang ilmu mawaris yaitu berkenaan dengan judul Mediasi Sengketa Waris Perspektif *Ash Shulhu* (Studi Kasus Di Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri).

B. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan pertimbangan berkenaan dengan issue Hukum Mediasi Sengketa Waris Perspektif Ash Shulhu (Studi Kasus Di Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri) oleh :

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian bagi peneliti sendiri dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan paham tentang Mediasi Sengketa Waris Perspektif Ash Shulhu (Studi Kasus Di Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri).

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bentuk pemahaman mengenai Mediasi Sengketa Waris Perspektif Ash Shulhu (Studi Kasus Di Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri) serta sebagai referensi ilmu pengetahuan tentang Ilmu Mawaris dan proses penyelesaiannya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menambah wawasan dan memberikan pengalaman yang sangat penting dan berguna untuk berkembangnya suatu kajian dalam penelitian.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan tafsir tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Mediasi Sengketa Waris Perspektif Ash Shulhu (Studi Kasus Di Desa

Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri) maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah secara Konseptual

a. Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.¹²

b. Sengketa Waris

Sengketa adalah tanah yang kepemilikannya dipermasalahkan oleh dua pihak, dimana kedua belah pihak saling berebut untuk mengklaim kepemilikan tanah tersebut. Warisan adalah peninggalan yang diberikan pada ahli waris saat seseorang meninggal dunia. Jadi sengketa waris merupakan harta peninggalan yang sedang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak.¹³

2. Penegasan istilah secara Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian ini dengan judul Mediasi Terhadap Sengketa Dalam Perkara Mediasi Sengketa Waris Perspektif Ash Shulhu (Studi Kasus Di Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri) hal ini menguraikan

¹² Sumarto, *“Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI”* Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2018. Hlm 2

¹³ *Ibid*

bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah yang diselesaikan secara *Non litigasi* atau diluar Pengadilan yang dimana sengketa waris ini berupa diselesaikan oleh mediator

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, mengenai diskripsi teori yang berisi pengertian dasar hukum menurut undang-undang yang berlaku, menurut hukum islam dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi Penelitian, kehadiran peneliti, data sumber data, pengecekan keabsahan temuan dan Tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil penelitian, meliputi paparan temuan, temuan penelitian.

Bab V Pembahasan.

Bab VI Penutup, berisi tentang Kesimpulan dan saran. Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup